

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amsari, Feri, 2011, *Perubahan UUD NRI 1945; Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jilmly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budhiati, Ida, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Sinar Grafika Jakarta.
- Fadjar, Mukthie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press Malang.
- Fahmi, Khairul, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2012, *“Demokrasi Lokal. Evaluasi Pilkada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Gaffar, Janedri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2019, *Penafsiran Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hartono Sunarjati, 1986, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang.
- International IDEA, 2002, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Stockhol.
- Junaidi, Veri, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta.
- Junaidi, Veri dkk, 2019, *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)*, Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, PT Sastra Hudaya, Jakarta.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, Mohammad, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

- _____, 2010, *Naskah Konferhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Edisi Revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2010, *Naskah Konferhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V: Pemilu*, Edisi Revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Maramis, Frans, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, Lembaga Negara Independen, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno, 2008, *mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Palguna, I D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1945, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riwanto, Agus, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rodee, Carlton Clymer dkk, 2013, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RadjaGrafindo, Jakarta.
- Rousseau, Jean Jacques, 2010, *Du Contract Social (Kontrak Sosial)*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Subekti Ramlan dkk, 2011, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- Suharizal, 2011, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sunarno, Siswanto, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang , 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Suriasumantri, Jujun. S. 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa ini*, Gramedia, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang Proses, dan hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2010, *Naskah Konferhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V: Pemilu*, Edisi Revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Wibowo, Mardian, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang)*, Rajawali Pers, Depok.
- Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Bisariyadi dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 3, September 2012.
- Fadjar, A.Mukthie “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Penyelesaian Pemiludan PHPU”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 Nomor 1, April 2009.

- Safaat, Muchammad Ali dkk, *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Sari, Sri Hastuti Puspita “Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi* Volume 8 Nomor 3, Juni 2011.
- Satriawan Iwan dkk, 2012, *Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sukriono, Didik “Menggagas Sistem Pemilihan Umum” *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang* Volume II Nomor 1, Juni 2009.
- Wicaksono, Dian Agung dan Ola Anisa Ayuta, *Inisiasi Pengadilan Khusus Kepala daerah Dalam menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia*, Jurnal Rechts vinding, Volume 4, Nomor 1, April 2015.

C. Tesis

- Arifin, Samsul, 2016, “Desain Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” *tesis*. Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada.
- Rajab, Achmadudin ,2013, “Tinjauan Yuridis Tentang Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada”, *tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia.
- Tandiasa, Viktor Santoso, 2014, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada.

D. Internet

- 30 Essential Questions, http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional_English/#2) Diakses Pada Sabtu 6 Mei 2018.
- Kanal Hukum, <https://www.kanalhukum.id/kanalis/dinamika-politik-legislasi-pembentukan-undang-undang-tentang-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota/36> Diakses Pada 4 September 2019 Pukul 05:00 WIB.
- Lulu Anjarsari, Bahas Tuntas Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16675> Diakses Pada Rabu 20 Januari 2021 Pukul 15.30 WIB.
- Mahkamah Konstitusi, Sejarah, dan Pembentukan,, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WTUyHjFjhH0> diakses pada Pukul 20:00 WIB, 4 Juni 2019.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4> diakses pada Minggu, 29 April 2021 Pukul 06.30.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, diakses pada Rabu 13 Januari 2021 Pukul 17.06 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saling Lempar Bola Panas, MA Lebih Tepat Adili Sengketa Pilkada, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10605> Diakses Pada Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 15.46 WIB.
- Metronews, <http://news.metrotvnews.com/opini/dN6Ojq0b-salah-arrah-revisi-uu-pilkada> Diakses Sabtu, 2 September 2019 Pukul 11.12 WIB.
- Principles of Constitutional Interpretation, http://www.constitution.org/cons/prin_cons.htm, diakses pada tanggal 30 April 2018.
- Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah / Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4> diakses Pada 5 Juni 2021, Pukul 22.02 WIB.
- Richard A. Posner, “What Am I?”, *Overcoming Law*, <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/interp.html>, diakses pada 4 Januari 2019.
- Ronal Faber, The Austrian Constitutional Court: an Overview, www.icljournal.com, diakses Minggu, 29 November 2020.
- Slamet Hariyanto, Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, <https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/01/29/sengketa-pemilihan-gubernur-sulawes-iselatan-2007/> diakses pada 15 Desember 2019.
- Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/21/063877220/yusril-ihza-pengadilan-khusus-sengketa-pilkada-perlu-dibentuk> Diakses Pada 29 Mei 2017 Pukul 06:11 WIB.
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Tata_Usaha_Negara Diakses Pada Jumat, 5 Mei 2018 pukul 06:06 WIB.
- Wikipedia, “Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 2020”, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2020 diakses pada Selasa, 11 Februari 2020.

E. Putusan

Putusan Nomor 482 K/ TUN/ 2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi 72-73/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243).
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246).
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota.

G. Peraturan Perundang-undangan Negara Lain

Constitution of the Kingdom of the Thailand.

The 1987 Constitution of the Republic Philippines.

The 2010 Rules Of The Presidential Electoral Tribunal.

The Constitution of Republic of Austria.

Federal Code of Electoral Institutions and Procedures.

Law of The Azerbaijan Republic “on Constitutional Court”.

H. Wawancara

Tanya Jawab dengan Enny Nurbaningrum di *General Lecture Constitutional Court and the Protection of Citizens’ Constitutional Rights at the Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta*, Selasa 2 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB.

Tanya Jawab dengan Maria Farida Indrati di Kelas Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat 25 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

Tanya Jawab dengan Refly Harun di Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 12 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Fadli Ramadhanil Selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, di Yogyakarta pada Rabu 2 Desember 2020, Pukul 09.35.

Wawancara dengan I. Dewa Gede Palguna selaku Mantan Hakim Konstitusi, di Jakarta pada Jumat 4 Desember 2020 Pukul 10.23 WIB.

Wawancara dengan Topo Santoso selaku Pengamat Pemilu, di Jakarta pada Jumat 4 Desember 2020, Pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Veri Junaidi selaku Pengamat Pemilu di KoDe Inisiatif Jakarta Pada Kamis 3 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

I. Sumber Lain

Bisariyadi dkk, 2011, Laporan Penelitian Komparasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Fahmi, Khaiful, *Menyelamatkan Keadilan Pilkada*, Harian Kompas edisi 24 Maret 2017.

Isra, Saldi, *Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas, 13 September 2005.

Junaidi, Veri, *Pengadilan Pemilu demi Kepastian Hukum*, Koran Kompas edisi Rabu, 22 Maret 2017.